

Lampiran : : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor : PPH-171.HH.01.03 TAHUN 2022

Tanggal : 7 Februari 2022

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

**A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN**

**I. DAFTAR INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

NO	JENIS INFORMASI	RINCIAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Informasi tentang profil Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Sejarah b. Visi dan misi organisasi c. Tugas dan fungsi d. Kedudukan dan domisili e. Struktur organisasi f. Profil pejabat	Sekretariat Badan
2	Informasi kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Pemberitaan kegiatan b. Rencana dan agenda kegiatan c. Penanggungjawab kegiatan	Sekretariat Badan
3	Informasi keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Laporan pertanggungjawaban keuangan b. Laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA) c. Realisasi Penyerapan Anggaran tiap satuan kerja	Sekretariat Badan
4	Informasi hasil pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Laporan capaian kinerja b. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) / tahun c. Laporan pelaksanaan Reformasi birokrasi, PMPRB dan ZI d. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) / Tahun e. E- Litbang f. Informasi perencanaan, pengadaan dan proses barang dan jasa	Sekretariat Badan
5	Informasi permasalahan	Data aplikasi SIPKUMHAM	Sekretariat Badan dan

	hukum di seluruh indonesia		Pusat
6	Informasi terkait isu aktual yang sedang terjadi	Informasi disampaikan dalam bentuk pemberitaan dan infografis di media sosial	Sekretariat Badan dan Pusat

## II. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SETIAP SAAT

NO	JENIS INFORMASI	RINCIAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Informasi penanganan pengaduan. b. Informasi jenis-jenis layanan publik yang diberikan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi Layanan kajian dan penelitian</li> <li>• Informasi Layanan narasumber</li> <li>• Informasi Layanan Ebook</li> <li>• Informasi Layanan Ejournal</li> <li>• Informasi Layanan Perpustakaan</li> </ul> c. Informasi standart operasional prosedur (SOP) d. Informasi survey kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi Balitbang Hukum dan HAM e. Informasi obrolan peneliti	Sekretariat Badan
2	Peraturan dan keputusan	a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum b. Informasi peraturan dan keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.	Sekretariat Badan dan Pusat
3	Hasil Penelitian dan kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	a. Ebook b. Ejournal c. Policy brief d. Policy paper e. Prosiding	Sekretariat dan Pusat

## III. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA MERTA

NO	JENIS INFORMASI	RINCIAN INFORMASI	KETERANGAN
1	-	-	-

## B. DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### I. SEKRETARIAT BADAN

No	Jenis Informasi
1.	Disposisi dari Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat <i>Confidential</i>
2.	Penilaian Pegawai (DP3, Uji Kelayakan dan Kepatuhan)
3.	Usulan Data Calon Pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan baperjakat
4.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5.	Administrasi Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
6.	Dokumen proses perceraian CPNS/PNS yang mengajukan izin cerai
7.	Proses evaluasi penempatan CPNS
8.	Evaluasi Jabatan
9.	<i>Database</i> Pegawai Balitbang (Rujukan PP No. 61 th 2010)
10.	Penyusunan Formasi Pegawai
11.	Perpindahan dan Mutasi Pegawai
12.	Penetapan Angka Kredit (usulan)
13.	Dokumen proses perencanaan dan penganggaran
14.	Dokumen pengadaan barang / jasa dari penyedia barang / jasa.
15.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang
16.	Arsip surat yang menurut sifatnya rahasia
17.	Dokumentasi hasil rapat yang sifatnya rahasia
18.	Laporan keuangan sebelum di audit
19.	Data gaji dan tunjangan Pegawai
20.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang
21.	Laporan hasil Pemeriksaan BPK
22.	Laporan Hasil pemeriksaan APIP
23.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
24.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
25.	Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
26.	Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

### II. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

No	Jenis Informasi
1.	Disposisi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat <i>Confidential</i>
2.	Informasi yang dapat mengungkap data responden
3.	Informasi yang dapat mengungkap data Intelegen
4.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum
5.	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
6.	Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden
7.	Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara

### III. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

No	Jenis Informasi
1.	Disposisi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat <i>Confidential</i>

2.	Informasi yang dapat mengungkap data responden
3.	Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen
4.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum
5.	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
6.	Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden
7.	Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara

#### IV. PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

No	Jenis Informasi
1.	Disposisi dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan atau yang setingkat yang Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat <i>Confidential</i>
2.	Informasi yang dapat mengungkap data responden
3.	Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen
4.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum
5.	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
6.	Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden
7.	Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara

#### V. PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HAM

No	Jenis Informasi
1.	Disposisi dari Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat <i>Confidential</i>
2.	Informasi yang dapat mengungkap data responden
3.	Informasi yang dapat mengungkap data Intelejen
4.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan Hukum
5.	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
6.	Informasi yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan responden
7.	Laporan hasil penelitian yang dapat membahayakan Negara
8.	Konfigurasi <i>database</i> dan aplikasi serta <i>username</i> dan <i>password</i>
9.	Perangkat Lunak / Keras Teknologi Informasi Pangkalan Data ( <i>Database</i> ) Internal Paten dan Desain
10.	Pangkalan Data ( <i>Database</i> ) Internal Paten dan Desain Industri yang belum diumumkan dalam berita resmi

KEPALA BADAN



*Sri Pugh Budi Utami*

SRI PUGUH BUDI UTAMI  
NIP. 19620702 198703 2 001